

ABSTRAK

Lembaga anti korupsi yang dibentuk di beberapa negara seringkali mendapatkan kritik dan atensi dari khalayak ramai berkaitan dengan efektivitasnya. Hal tersebut dikarenakan visibilitas yang tinggi namun dampak yang diberikan masih belum sebanding dengan sumberdaya yang dialokasikan. Pembentukan lembaga anti korupsi dengan menjadikan ICAC sebagai *role-model* masih memunculkan kekhawatiran karena korupsi yang masih sering dianggap sebagai isu yang berdiri sendiri. Anggapan ini yang kemudian membuat negara tidak menyusun strategi anti korupsi nasional guna mendukung ACAs yang dibentuk. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan performa tiga lembaga anti korupsi, yaitu KPK, MACC, dan ICAC dengan menggunakan ANOVA. Variabel yang digunakan adalah: a) Rasio laporan pengaduan masyarakat yang diterima dengan laporan yang berhasil ditelaah dari masing-masing lembaga anti korupsi, b) Rasio anggaran dengan jumlah pegawai masing-masing lembaga anti korupsi, dan c) *Conviction rate* masing-masing lembaga anti korupsi. Penambahan jumlah personil di masing-masing lembaga perlu diimbangi dengan kenaikan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Semakin besar alokasi anggaran akan memperbesar rasio anggaran per personil yang berguna dalam operasional pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: ACAs, Anti korupsi, *conviction rate*, alokasi anggaran, ANOVA.

ABSTRACT

Anti-corruption institutions established in several countries often receive criticism and attention from the general public regarding their effectiveness. This is due to the high visibility but the impact is still not proportional to the resources allocated. The establishment of an anti-corruption agency by using ICAC as a role model still raises concerns because corruption is often seen as an independent issue. This assumption then made the country not develop a national anti-corruption strategy to support the ACA that was formed. This research was conducted to find out and compare the performance of three anti-corruption agencies, namely the KPK, MACC, and ICAC by using ANOVA. The variables used are: a) The ratio of public complaint reports received to reports successfully reviewed from each anti-corruption agency, b) The ratio of the budget to the number of employees of each anti-corruption agency, and c) The level of confidence of each anti-corruption agency corruption. The increase in the number of personnel in each institution needs to be balanced with the increase in the budget allocated by the government. The larger the budget allocation will increase the ratio of budget per personnel which is useful in more effective and efficient corruption eradication operations.

Keywords: ACA, Anti-corruption, confidence level, budget allocation, ANOVA.